

---

**PENERAPAN ACTIVITY BASED BUDGETING (ABB) PADA ANGGARAN OPERASIONAL KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROFINSI SULAWESI UTARA**

Maydeleine Binilang<sup>1</sup>, Heince R. N. Wokas<sup>2</sup>, Christian V. Datu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : maydeleinebinilang@gmail.com

**ABSTRACT**

*The research focuses on the implementation of Activity Based Budgeting (ABB) in the operational budget of the Education Department of North Sulawesi Province, Indonesia. It evaluates the effectiveness of ABB as a tool for enhancing financial accountability and efficiency in the public sector. The study adopts a qualitative approach, utilizing interviews, direct observations, and documentation to gain a comprehensive understanding of the budgeting process. It compares the conventional budgeting methods with ABB, examining budgetary procedures, accountability, and the alignment of financial reports with legal regulations. The analysis reveals that ABB provides a more detailed and accountable framework, addressing issues of underfinancing and overfinancing by identifying cost drivers, calculating basic units for each activity, and totaling costs for activities. This allows for a more accurate and transparent financial management, leading to significant improvements in budgetary clarity and accountability compared to previous years. The study finds that the Education Department's implementation of ABB in 2021 has not only enhanced the precision of financial reporting but also improved the strategic allocation of resources. The findings suggest that ABB can effectively address discrepancies in budget reporting and enhance the financial management of public institutions. The research concludes that the Education Department of North Sulawesi Province should continue using ABB to maintain its current high level of financial performance and responsibility, and recommends its adoption by other governmental entities seeking to improve financial management and transparency.*

**Keywords:** *Operational Budget, Public Sector Management Accounting, Fund Realization Report.*

**1. PENDAHULUAN**

Undang – Undang yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia ada dua, dimana dalam undang – undang ini berisi tentang pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Pemberian otonomi daerah ditujukan untuk memberi kekuatan dan peluang kepada wilayah lokal dalam mengelola sendiri aspek-aspek seperti perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih luas, konkret, dan bertanggung jawab. Inti dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini terletak pada tiga misi utama: Pertama, meningkatkan mutu dan jumlah layanan publik serta kesejahteraan warga. Kedua, menghasilkan pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efisien dan efektif. Ketiga, memperkuat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam proses pembangunan.

Tidak hanya diharapkan sebagai manfaat untuk meningkatkan pendapatan, namun

penggunaan anggaran dalam pembangunan juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang telah kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat. Komponen yang akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah ada dua, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Budgeting reform atau reformasi anggaran perlu dilakukan untuk perubahan tersebut. Evaluasi terhadap kedua bagian tersebut termasuk pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas, yang semuanya sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghasilkan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu perubahan utama adalah kebutuhan untuk mereformasi proses anggaran. Reformasi anggaran ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Perbedaan mendasar terlihat ketika membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah tidak lagi memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Provinsi atau pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Sebaliknya, pengesahan cukup dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (PERDA). Ini menandakan langkah maju dalam otonomi daerah, memberikan lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan mereka. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam bidang pendidikan. Dalam mengelola aspek keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyusunan anggaran secara konvensional, padahal lemahnya perencanaan tersebut memunculkan adanya underfinancing dan overfinancing yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Activity Based Budgeting (ABB) adalah proses penyusunan anggaran berdasarkan atas kegiatan atau memperhatikan aktivitas overhead sebagai sumber biaya yang muncul

Sesuai dengan penjelasan diatas, munculah kecurigaan yang akan berdampak oleh Instansi mengenai adanya ketidak sesuaian budget atau anggaran yang ditentukan mungkin akan mempengaruhi atas perhitungan serta pertanggung jawaban dalam pelaporan. Dari kecurigaan ini, gambaran masalah yang akan timbul dimasa mendatang adalah adanya ketidak selarasan akan pelaporan yang dilaksanakannya berhubungan dengan penggunaan anggaran pihak Instansi dengan Anggaran Belanja dan Biaya Daerah (APBD). Dalam hal ini, untuk menekan atas kecurigaan terjadinya masalah. Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) harus dilaksanakan dengan sesuai ketentuan.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah adanya perhitungan dan pelaporan atas pertanggung jawaban realisasi anggaran telah sesuai dengan ketentuan atau tidak dan apakah pergantian atas perhitungan secara konvensional menjadi perhitungan bermetode ABB mampu untuk mengatasi kemungkinan atas kecurigaan permasalahan atas ketidaksesuaian pelaporan. Maka oleh karena itu, penelitian memutuskan untuk membuat skripsi ini dengan judul “ Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) Pada Anggaran Operasional Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara ”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

Menurut Lanin (2018), akuntansi merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi, mengesahkan, mengukur, mengklarifikasi, menggabungkan, meringkas, dan menyajikan data

---

keuangan dasar yang terjadi pada suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

## **2.2 Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi Pemerintahan Hasanah dan Fauzi (2017:2) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni 2015b:18).

## **2.3 Pengertian Anggaran**

Anggaran, atau budget, adalah sebuah instrumen penting dalam pengawasan keuangan yang digunakan oleh perusahaan, baik yang bertujuan mencari keuntungan maupun yang tidak berorientasi pada laba. Disusun dengan metode yang terstruktur dan diwujudkan dalam bentuk numerik, anggaran diungkapkan dalam satuan uang dan mencakup semua aktivitas bisnis perusahaan untuk periode waktu tertentu di masa depan.

Anggaran Menurut Mardiasmo (2018:75) Anggaran adalah sebuah deklarasi tentang proyeksi kinerja yang ditargetkan untuk sebuah periode khusus, yang diungkapkan dalam nilai keuangan. Di sisi lain, penganggaran merujuk pada proses atau teknik yang digunakan dalam merancang dan menyusun anggaran tersebut.

Menurut M. Fuad dkk (2020:2), mendefinisikan “Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang.”

Halim dan Iqbal (2019:139) menyimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut:

1. Sebagai Dokumen Informasi atau Deklarasi
2. Tentang Strategi atau Kebijakan Keuangan
3. Oleh Organisasi atau Entitas Bisnis
4. Untuk Periode Waktu yang Spesifik
5. Estimasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah
6. Prediksi untuk Periode Tertentu

## **2.4 Manfaat Anggaran**

Manfaat anggaran menurut Nafarin (2007):

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai .
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para pejabat pemerintah, khususnya bagian keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor

## **2.5 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik adalah blue print organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan (Mahmudi, 2019:59). Anggaran sektor publik berisi rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter atau dalam bentuk sederhana (Mardiasmo, 2018:76).

## **2.6 Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran berfungsi sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja atau tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
5. Anggaran sebagai alat pengendali yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

### **2.7 Tujuan Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan dari proses penyusunan anggaran yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **2.8 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik**

Akuntansi manajemen menurut Bastian (2017) adalah sebuah kolaborasi antara kajian dan analisa informasi yang digunakan untuk menggambarkan perencanaan, pengambilan keputusan untuk manajemen, mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi standart untuk bidang keuangan, serta untuk memberikan pengendalian yang sesuai dalam menopang kinerja manajemen dalam sebuah organisasi terutama dibidang informasi internal. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki keterkaitan atas penyediaan informasi keuangan pada pihak internal organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik mencakup; akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi revaluasi, dan akuntansi pengendalian. Dalam proses akuntansi manajemen sektor publik terdapat penggunaan biaya, kualitas, dan waktu berbasis informasi untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam organisasi publik..

### **2.9 Pengertian Teori Activity Based Budgeting**

Menurut Hansen dan Otley (2003: 18), Activity Based Budgeting (ABB) adalah proses penyusunan anggaran berdasarkan atas kegiatan atau memperhatikan aktivitas overhead sebagai sumber biaya yang muncul. metode penganggaran aktivitas yang dianalisis secara menyeluruh untuk memprediksi biaya dan merupakan suatu jenis anggaran yang menggunakan beberapa rumus biaya untuk masing – masing aktivitas yang terjadi berdasarkan pergerakan biaya yang dikonsumsinya. Activity Based Budgeting merupakan prosedur penyusunan anggaran yang berfokus pada biaya aktivitas overhead dalam kegiatan operasional. Penyusunan anggaran berbasis aktivitas ABB memiliki potensi yang lebih akurat dari pada anggaran tradisional karna ABB berfokus pada ukuran output untuk setiap aktivitas sehingga perilaku biaya dapat dipahami secara lebih rinci.

### **2.10 Konsep Activity Based Budgeting**

Menurut Eka Nurmala Sari pada Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 10 Nomor 2 (2010: 124) Konsep Activity Based Budgeting (ABB) yaitu mengontrol anggaran dengan cara menelusuri aktivitas-aktivitas yang menggunakan sumber daya dan semua hal tersebut didasari dengan pergerakan atas kegiatan atau aktivitas lembaga. Ada tujuh pemacu nilai (value drivers) yang menjadi Fokus utama anggaran diarahkan yaitu :

1. Pemerolehan atau pertumbuhan pangsa pasar
2. Peningkatan laju pertumbuhan penjualan
3. Peningkatan produktivitas aktiva

4. Peningkatan profit margin
5. Pengurangan pajak penghasilan
6. Pengurangan biaya
7. Pengurangan biaya modal (cost of capital)

Menurut Shane (2005: 19) Activity based – budgeting dilandasi oleh tiga mindset yaitu : customer value mindset, continous improvement mindset, dan organizational system mindset. Customer value mindset berarah pada proses penyusunan anggaran sehingga organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pelanggan melalui berbagai value added activity.

### **2.11 Penyusunan Activity Based Budgeting**

Menurut Yulius (2012: 20) pada penyusunan Activity Based Budgeting (ABB) memerlukan beberapa hal untuk dilakukan, antara lain :

1. Mengidentifikasi pemicu biaya
2. Menghitung unit dasar yang diperlukan untuk setiap aktivitas
3. Hitung biaya total pada setiap aktivitas

### **2.12 Keunggulan Activity Based Budgeting**

Menurut Eka Nurmala Sari pada Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 10 Nomor 2 (2010: 125) Dibandingkan dengan Functional – Based Budgeting. Activity – Based Budgeting memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, penyusunan anggaran mendorong semua anggota organisasi untuk mencari peluang perbaikan dalam sistem yang menghasilkan nilai bagi pelanggan.
2. Penyusunan anggaran menunjukkan hubungan jelas antara aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pelanggan dan pendapatan serta biaya yang timbul sebagai akibat dari aktivitas tersebut.
3. Activity-based budgeting mendorong pemikiran berbasis sistem dan menekankan pentingnya keseluruhan daripada hanya bagian-bagiannya, berbeda dengan functional-based budgeting yang lebih fokus pada fungsi-fungsi individu.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka, namun berupa hasil wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara objektif efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Manado.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data yang digunakan berbentuk informasi non angka yang berhubungan sebagai peninjau dalam penelitian ini seperti, lokasi perusahaan, bidang usaha, visi-misi, struktur organisasi, kebijakan perusahaan penerapan Activity Based Budgeting yang dilaksanakan. Lainnya terdapat data kuantitatif yang berhubungan dengan angka dalam ditunjukkan sebagai dokumen pendukung atas hasil yang didapatkan.

#### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data ditinjau dari data primer dan sekunder. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original yang diambil dari tinjauan langsung serta pernyataan dari objek penelitian. Pada Data sekunder, proses yang dilakukan adalah pengolahan atas data angka yang didapatkan yang bertujuan sebagai penopang atau pendukung dari data primer.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi untuk mendapatkan kebutuhan data dalam penelitian.

### **3.4 Proses Analisis Data**

Dalam hal analisis kualitatif Bogdan (dalam Sugiyono , 2013:334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Menurut Miles, Huberman & Saldan (2014) ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Analisis Prosedur Penyusunan Anggaran Operasional

Analisis mendetail mengenai prosedur penyusunan anggaran operasional di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis di sini melibatkan pengumpulan data prosedural, penelaahan dokumen, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di Dinas tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas prosedur anggaran operasional yang ada, termasuk langkah-langkah perencanaan, penyusunan, dan persetujuan anggaran.

2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAP

Bagian ini mengkaji laporan realisasi anggaran dari Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) di Dinas Pendidikan. Analisis ini memeriksa bagaimana anggaran diimplementasikan dan merealisasi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, alokasi dana, dan penggunaan anggaran, serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

3. Pembahasan Hasil Analisa

Pembahasan akan mencakup Kesesuaian Prosedur Penyusunan Anggaran, Pembuktian Selisih Metode Konvensional dan Accounting Based Budgeting, dan evaluasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menggunakan Penyusunan ABB Dibandingkan dengan Kebijakan Dasar Hukum yang Berlaku.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil penelitian**

#### **4.1.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Operasional Pada Tahun 2020 Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara**

LRA SAP yang diambil langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen yang menyatakan perbedaan anggaran. LRA SAP tertera dihitung menggunakan metode Activity Based Budgeting bertujuan untuk melihat apakah faktor perencanaan yang telah dinyatakan sebagai kemungkinan permasalahan dapat teratasi dengan tata cara prosedur yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Dari LRA tersebut, dapat dilihat bagaimana Instansi mampu untuk mempertanggung jawabkan atas aktivitas berhubungan anggaran yang telah terealisasi dengan kesesuaian angka pada anggaran yang telah direncanakan.

Jika Instansi mampu untuk memberikan pelaporan yang sesuai atau sah dan mampu mempertanggung jawabkan atas realisasi anggaran yang terdjadi, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Activity Based Budgeting pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil dilaksanakan. Untuk bukti atas LRA yang telah menggunakan metode ABB, dapat dilihat pada bagian lampiran.

Program yang digunakan pada tahun 2021 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Disini kejelasan atas penggunaan dana lebih terukur serta dalam pertanggung jawaban pelaporan lebih dapat dilihat dibandingkan dalam pelaporan tahun 2021.

Dinyatakan seperti itu dapat dilihat dari hasil laporan mengenai selisih pemanfaatan anggaran serta prosedur dalam pertanggung jawaban anggaran yang berhubungan dengan Activity Based Budgeting (ABB) sesuai dengan ketentuan. Hal ini didukung dengan prosedur seperti pada RKA221-2020 yang digunakan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020. Sangat membantu dalam pengarahannya atas angka penggunaan anggaran serta kegunaannya.

Dalam hal ini, mengenai penggambaran atas masalah yang mungkin akan terjadi berhubungan dengan atas ketidak selarasan akan angka realisasi yang sebenarnya. Dapat diatasi dengan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggunakan metode perhitungan Activity Based Budgeting (ABB) pada pelaporannya.

**4.2. Pembahasan**

Dalam pencatatan atas pelaporan realisasi anggaran yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara terjadi perubahan metode dari tahun 2021. Metode yang digunakan dalam pelaporan realisasi anggaran pada tahun 2020 adalah metode konvensional yang dalam garis besar diartikan sebagai metode yang dicatat hanya dalam bentuk total menyeluruh dengan kata lain tidak dirincikan. Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021, metode yang digunakan adalah metode Activity Based Budgeting yang berarti seluruh transaksi yang berhubungan dengan realisasi akan tercatat dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan pelaporan.

Dalam pembuktian selisih metode, perhitungan akan diambil dari salah 1 kategori yang tercatat sama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 dan tahun 2021 lalu dibandingkan dengan rasio efektivitas bertujuan untuk melihat kriteria keefektifan serta meninjau perbedaan selisih yang terjadi. Rumus Rasio Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Belanja}) / (\text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$$

**Tabel 4.1**  
**Penilaian Dari Hasil Rasio Efektivitas**

Presentase Pengukuran	Kriteria Rasio Eektif
100% ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan (2023)

**Tabel 4.2**  
**Rasio Perhitungan Rasio Efektivitas**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	595.999.133.756	573..272.978.395	96,26%	Efektif
2021	616.676.514.279	580.003.199.551	94,05%	Efektif

Sumber : Data Olahan (2023)

Dalam perhitungan rasio efektivitas dalam pembuktian selisih, kategori yang belanja yang digunakan adalah “Belanja Pegawai” yang menjadi tolak ukur selisih diantara kedua LRA pada tahun 2020 dan 2021. Dalam hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa metode yang digunakan antara metode konvensional dan metode Activity Based Budgeting itu sama yaitu dinyatakan sebagai kriteria efektif. Dari hasil tersebut, dapat diketahui walau prosedur yang digunakan merupakan metode konvensional sama seperti metode 2020, dinyatakan dalam pelaporan bahwa prosedur tidak mempengaruhi hasil yang Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021.

---

Mengenai dasar atas penyusunan yang digunakan. Menurut Yulius (2012: 20) pada penyusunan Activity Based Budgeting (ABB) memerlukan beberapa hal untuk dilakukan, antara lain :

1. Mengidentifikasi pemicu biaya
2. Menghitung unit dasar yang diperlukan untuk setiap aktivitas
3. Hitung biaya total pada setiap aktivitas

Activity Based Budgeting secara garis besar adalah sebuah proses atau metode penyusunan anggaran berdasarkan atas kegiatan secara menyeluruh yang tercatat sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah. Dalam pembahasan ini, prosedur yang digunakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mendukung Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada 4.2.1 akan dinilai berdasarkan dasar penyusunan Activity Based Budgeting (ABB).

Alasan dalam perbandingan ini adalah, untuk menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan untuk pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah sepenuhnya memenuhi standar dalam penyusunan dengan metode Activity Based Budgeting (ABB). Perbandingan ini akan dievaluasi berdasarkan fungsi adanya prosedur dengan dasar penyusunan ABB. Berikut pembahasan evaluasi prosedur berdasarkan dasar penyusunan ABB :

1. Mengidentifikasi pemicu biaya

Pada dasar penyusunan ABB ini, mengidentifikasi pemicu biaya merupakan langkah untuk melihat atas sumber alasan terjadinya penggunaan anggaran. Dalam prosedur yang diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah dinyatakan sepenuhnya mampu untuk menunjukkan sumber alasan atas penggunaan anggaran. Dapat dilihat dari prosedur dan data antara lain :

- a. RKA221-2020-PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- b. RKA221-2020-PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN SKPD
- c. RKA221-2020-PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Dalam 3 prosedur ini, isi dari tujuan penyusunan laporan ini menegaskan atas penggunaan anggaran serta sumber alasan adanya anggaran tersebut.

2. Menghitung unit dasar yang diperlukan untuk setiap aktivitas

Penggunaan anggaran untuk aktivitas dari sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah. Dalam prosedur yang diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Pada dasar penyusunan ABB, menghitung unit dasar yang diperlukan untuk setiap aktivitas merupakan dasar penyusunan dilihat dari perencanaan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah sepenuhnya mampu menunjukkan bentuk perencanaan dan gambaran akhir dari penggunaan anggaran. Hal itu dapat dilihat dari prosedur dan data antara lain :

- a. RKA221-2020-PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
- b. RKA221-2020-PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dari 6 prosedur, terdapat 2 tahap yang berisi mengenai gambaran atas penggunaan anggaran dan sumber pendukung atas realisasi yang terjadi dalam penggunaan anggaran.

3. Hitung biaya total setiap aktivitas

Merupakan dasar penyusunan terakhir dalam metode ABB. pada dasar penyusunan ini, prosedur harus mampu untuk menunjukkan secara menyeluruh atas penggunaan dana yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan ataupun instansi pemerintah. Dalam prosedur yang diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dalam membuat

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), telah dinyatakan sepenuhnya mampu untuk memenuhi dasar terakhir pada penyusunan ABB.

Sebab dalam perincian, semua prosedur sudah menunjukkan fungsi dan guna yang bertujuan untuk mendukung hasil dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, mengenai penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada anggaran operasional kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara didasari dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah :

1. Untuk prosedur dalam penyusunan pelaporan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Dengan keterangan bahwa penyusunan yang didasarkan sebagai pondasi untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah tercatat sesuai dengan ketentuan SOP pelaporan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Dan untuk kelayakan prosedur dalam penggunaan metode Activity Based Budgeting (ABB), dapat dinyatakan bahwa prosedur telah mampu untuk mempertanggungjawabkan atas adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Metode Tersebut.
2. Untuk selisih dalam Laporan Realisasi Anggaran, telah dinyatakan bahwa tidak ada permasalahan yang akan terjadi dalam metode serta prosedur yang telah diterapkan. Dengan keterangan, laporan yang diberikan dinyatakan mampu menjelaskan atas kegiatan yang telah dilakukan dan perbedaan selisih atas angka penggunaan anggaran dan perencanaan.

### 5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini yang didasari dengan penggambaran masalah mengenai metode penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Peneliti memberikan saran kepada pihak penanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara untuk tetap mempertahankan sistem serta olah kinerja yang ditunjukkan pada saat ini. Sebab dari kinerja yang ditunjukkan saat ini terutama metode penyusunan berbasis Activity Based Budgeting (ABB) dalam LRA. telah mampu menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat baik dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Frederick, Shane. (2005). *Cognitive Reflection and Decision Making*. Journal of Economic Perspectives. 19. 25-42. 10.1257/089533005775196732..
- Fuad, M., & Tim Penulis. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hansen, Stephen & Otley, David & Stede, Wim. (2003). *Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective*. Journal of Management Accounting Research. 15. 10.2139/ssrn.410544.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor: In Media.

- Lanin, Dasman & Hermanto, Nailuredha. (2018). *The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia*. International Journal of Social Economics. 46. 10.1108/IJSE-04-2017-0151.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Murphy, Shane. (2005). *The Sport Psych Handbook: A Complete Guide to Today's Best Mental Training Techniques*. Human Kinetics.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, E. N. (2010). *Konsep Anggaran dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 10(2), 471. <https://doi.org/10.30596/jrab.v10i2.471>.
- Sari, Eka Nurmala. (2010). *Konsep Anggaran Dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 10(2). <https://doi.org/10.30596/jrab.v10i2.471>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta : Alfabeta
- Sujarweni, (2015). *Metodologi Penelitian dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pers.
- Yulius, Saltian P. (2012). *Analisis Value Chain Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Pada PT Pelindo IV Makassar*. S1 Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin. 67 hal.